

**ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM DAFTAR BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU 2019  
( STUDY UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HANIF MAULUDIN**

**NIM : C75214017**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Muhammad Hanif Mauludin  
NIM : C75214017  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan  
Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif  
Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 )

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 06 Agustus 2018  
Saya yang menyatakan.



Muhammad Hanif Mauludin  
NIM.C75214017

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanif Mauludin NIM C75214017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya 5 Agustus 2018  
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH  
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanif Mauludin, NIM: C75214017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH

NIP.196803292000032001

Penguji II



Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.

NIP. 195711101996031001

Penguji III



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Wahid Hadi Purnomo, MH

NIP. 197410252006041002

Surabaya 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HANIF MAULUDIN  
NIM : C75214017  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail address : [hanif.mauludin260796@gmail.com](mailto:hanif.mauludin260796@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif

Pada Pemilu 2019 ( Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 )

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(MUHAMMAD HANIF MAULUDIN)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) untuk menjawab Bagaimana dalam bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* tentang keterwakilan perempuan?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif, yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan referensi pustaka yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, website, terutama yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk kuota keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 harus memuat paling sedikit kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% didalam lembaga legislatif dan ketentuan tersebut harus diberlakukan pada pemilu 2019 akan datang. Menurut *Fiqh siyasah* untuk keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif sah saja, di antara ulama itu adalah Ibnu Hazm, dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.

Diharapkan pada pemilu legislatif 2019 yang akan datang representasi keterwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya pada periode 2014 lalu yang belum mencapai target yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tentang pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit harus memenuhi kuota sebanyak 30%, dan agar partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan tersebut.







## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perempuan teringat terhadap pahlawan nasional sekaligus dikenal sebagai tokoh pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia, beliau memberikan dukungan penuh terhadap kesejahteraan perempuan yang dulunya perempuan tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali dan akhirnya beliau memperjuangkan agar perempuan di Indonesia dapat mengenyam pendidikan dan beliau bersikeras agar kaum perempuan tidak dipandang sebelah mata dengan dipandang lemah dan dapat ditindas dengan semenah menah.

Raden Ajeng Kartini dapat dikatakan sebagai perempuan Indonesia yang namanya acapkali teringat sebagai refrensi bangkitnya kesadaran bagi kaum perempuan untuk masa-masa selanjutnya<sup>1</sup>. Dan sembari beliau mengobarkan semangat terhadap perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini juga telah menulis yang terkenal dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

Menurut Cora Vreede-De Stuers menyebut Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu tokoh penting dari “para pelopor gerakan feminis” yang maksudnya disini kurang lebih adalah bahwa Raden Ajeng Kartini yang berperan penting terhadap kebangkitan kaum perempuan di Indonesia yang di

<sup>1</sup> Nurani Soyomukti, *Perempuan Dimata Soekarno* ( Jogjakarta: Garasi, 2009 ) 27.

Sampai pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dikarenakan telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi<sup>2</sup> :

- 1). Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2). Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Dengan adanya kesetaraan tersebut pemerintah mencanangkan adanya keterwakilan perempuan di legislatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 : Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ( tiga puluh persen )<sup>3</sup> dengan adanya keterwakilan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dengan mengembangkan keterwakilan perempuan, perempuan dapat menjadi politikus yang andal, politikus yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya, politikus yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki karena politikus perempuan dapat mengasah sifat keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan agenda politiknya.<sup>4</sup>

Kekuasaan perempuan mencakup nalar, tujuan, dan agenda yang hendak dicapai, Sidney Verba dari Universitas Harvard menegaskan bahwa sumbanga terpenting dari perempuan dikancah politik yaitu mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ketimbang memperluas lingkup kekuasaan sendiri.<sup>5</sup>

Perempuan juga mempunyai hak yang setara untuk berkiprah dalam politik, karena itu keterwakilan perempuan dalam lembaga politik sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri menaruh konsen terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan didalam lembaga politik sekaligus mendorong partisipasi kaum perempuan untuk ikut andil di lembaga politik dengan melalui program pendidikan politik.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sidney Verba, *Women in American Politic*, bagian penutup dalam *Women, Politics and Change*, Louise A. Tilly dan Patricia Gurin, Russel Sage Foundation, New York, 1990, Hlm. 55-72.

[illegible]

Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dilembaga-lembaga politik khususnya lembaga legislatif maupun didalam kehidupan publik, perempuan perlu menempati posisi didalam lembaga legislatif agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga berlaku bagi kaum perempuan.<sup>8</sup>

Menurut Montesquieu dalam tiap-tiap pemerintahan ada tiga kekuasaan yaitu kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif yang dimana urusan-urusan kedua kekuasaan ini berhubungan dengan hukum antar bangsa, dan kekuasaan Yudikatif berhubungan dengan urusan-urusan hukum bagi warna Negara.<sup>9</sup> dan penulis kini lebih condong membahas tentang keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif.

Lembaga legislatif di indonesia yang merupakan bagian yang integral dari struktur politik berdasarkan ideologi Negara Pancasila dan Undang-

<sup>8</sup> Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No 1 Vol 6 (April, 2016), 11.

<sup>9</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, penerbit Badan Penerbit Kristen, Jakarta, tahun 1970, Hlm. 19.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang merupakan hakekat dan eksistensi dari lembaga legislatif Indonesia merupakan pencerminan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang dapat menjamin kesinambungan dan kestabilan politik Negara.<sup>10</sup>

Agar keterwakilan perempuan dapat dimaksimalkan perlu adanya keikutsetaan pemerintah untuk memberikan pengaruh positif terhadap warga Negara Indonesia khususnya perempuan sangat berperan penting, tetapi untuk hal itu saja dirasa belum cukup sempurna bilamana masih minim sekali kesadaran pribadi perempuan untuk dapat ikut andil didalam kancah politik khususnya dilembaga politik yaitu lembaga Legislatif.

Tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka di antaranya; hak untuk mengungkapkan pendapat, hak pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat berkaitan dengan politik.

---

<sup>10</sup> Ramdlon Naning S.H., *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1982), 2.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termaginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan diparlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan dilembaga DPR, hanya berkutat diangka 6% - 13% sejak periode tahun 1950 – 2004. Baru pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15%, yaitu 17,86%, atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.<sup>11</sup>

Melihat dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen didaftar calon legislatif belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. Pada tahun 2004 keterwakilan perempuan hanya berhasil menguasai 11.24% kursi di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21%, sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi hanya 17%.

Dari uraian keterwakilan perempuan dalam legislatif periode sebelumnya pada tahun 2004, 2009, 2014 belum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245, karena belum

---

<sup>11</sup> Nalom Kurniawan, “Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), 717-718.

memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 30% dan masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum islam tentang partisipasi perempuan di kancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.<sup>12</sup>

Pada Al Quran dijelaskan di surat An-Naml Ayat 32-35:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِيْ أَمْرِىْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ (32)  
 أُولُوا قُوَّةً وَأُولُوا نَأْسٍ شَدِيْدٍ هَٰذَا أَمْرٌ إِلَيْكَ فَأَنْظِرْنِىْ مَاذَا تَأْمُرْنَ (33) قَالَتْ إِنَّ قَالُوا نَحْنُ  
 الْمُلُوكُ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ (34) وَإِنِّ  
 مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرْهُنَّ يُرْجَعْنَ الْمُرْسَلُونَ (35)

Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan

<sup>12</sup> Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), 107.



sebelum kamu berada dalam majelis (ku).” Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *Taklif* (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi *insaniyah* (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.<sup>13</sup>

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 ( Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ), agar pembahasan lebih fokus yaitu :

1. Bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik pada pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 tentang pemilu.

---

<sup>13</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 118.



3. Pembahasan mengenai kuota 30% keterwakilan di lembaga legislatif
4. Analisis prespektif *Fiqh Siyasa* terhadap keterwakilan perempuan dalam bakal calon legislatif.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi dan batasan-batasan perumusan masalah hendak diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dalam bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasa* tentang keterwakilan perempuan?

#### D. Kajian pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar tentang masalah keterwakilan perempuan dilegislatif, agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut yang dapat di temukan penulis sejauh dengan masalah-masalah yang akan di tulis. Penelitian terdahulu antara lain :

1. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 5 Gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan UU Nomor. 8 Tahun 2012 tentang





perempuan yang duduk dilembaga legislatif.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan di Partai politik untuk menjadi anggota dilembaga legislatures dan lebih menariknya lagi yaitu dalam skripsi saya akan ditambahkan tentang analisis *Fiqh Siyasah* untuk membahas mengenai keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif.

3. **Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Surakarta.** Skripsi ini ditulis oleh Rosarina Muri berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret di Surakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel terhadap 4 partai politik yang dimana partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), Partai Golongan Karya ( GOLKAR ), Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) penulis menggali data-data mengenai keterwakilan perempuan terhadap 4 partai tersebut dengan menggunakan model interaktif analisis yaitu model analisis dengan

---

<sup>15</sup> Nuni Silvana, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif.*”( Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, Purwokarta, 2013).

tiga komponen analisis yang utama adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil yang telah didapatkan oleh penulis dari penelitian tersebut adalah pertama, partai politik telah memberikan respon positif terhadap keterwakilan perempuan yang berisikan 30% dalam pencalonan legislatif pemilu 2009 di Surakarta. Kedua, masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik.<sup>16</sup>

Jika dalam penulisan skripsi yang akan saya ditulis sangat berbanding jauh antara pembahasannya, penulis ini lebih condong membahas mengenai dalam bakal calon keterwakilan perempuan di legislatif menurut Undang-Undang Tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi, dan diambil dari referensi jurnal, buku dan diperdalam dengan bahasan mengenai analisis *Fiqh Siyasah* nya, dan rujukan-rujukan Al Quran dan hadits.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

---

<sup>16</sup> Rosarina Muri, "Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Surakarta." ( Skripsi- Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2009).

1. Untuk mengetahui bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik pemilu tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* tentang kewajiban keterwakilan perempuan.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan tentang pelaksanaan penyusunan terhadap daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilu 2019.

Selain itu penulisan ini dapat membawa dampak yang positif terhadap masyarakat khususnya perempuan agar ikut andil terhadap partai politik untuk mengisi keterwakilan perempuan dilegislatif.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilu 2019.

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapat pandangan dan agar tidak menjadi salah paham pembaca dalam membaca skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap judul yang akan diangkat. Hal ini untuk mempermudah pembaca memahami apa isi dari skripsi ini dan mengantisipasi agar pembaca tidak berpikiran keluar konteks, berikut akan dijelaskan oleh penulis beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam penulisan ini :

1. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu atau pemahaman mendalam tentang syariat-syariat hukum yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan yang dikaitkan dari segi aspek hukum islam agar pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>17</sup>
2. Keterwakilan Perempuan dalam lembaga legislatif adalah pengisian keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif untuk memenuhi representasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 4.







#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan terperinci secara jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Berikut sistematika penyusunan skripsi:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan

tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori *Fiqh Siyasah* yang ditekankan pada *Siyasah Dusturiyah* yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga yaitu memuat mengenai analisis terhadap tema bahan-bahan hukum penelitian, menafsirkan dan mengintergrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada.

Bab empat yaitu memuat mengenai kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab II. Pada bab ini yang nantinya berisikan tiga jawaban yakni yang pertama jawaban mengenai Bagaimana pelaksanaan penyusunan daftar bakal calon keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2019. Kedua, Bagaimana sanksi hukumnya bila keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Ketiga, Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* tentang kewajiban keterwakilan perempuan.

Bagian akhir berisikan berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BAKAL CALON LEGISLATIF  
MENURUT *FIQH SIYASAH***

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan yang kedua yaitu *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur. Adapun pendapat para ahli mengenai kata *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Menurut Imam al-Tirmidzi menyebut “fiqh tentang suatu” seperti dikutip dari Amir Syarifuddin yang berartikan mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), 15.

“ Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci ( tafsili ).<sup>2</sup>

Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

Sedangkan secara etimologis ( bahasa ) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>3</sup> Kata *fiqh* secara leksikal artinya yaitu tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang digunakan secara khusus dibidang agama, yurisprudensi islam.<sup>4</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama ( *mujtahidin* ) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, ( Kairo : Dar al-fikr, 1957), 26.

<sup>3</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

<sup>4</sup> Ibid Hlm 21.

Adapun dilihat dari segi terminologisnya ( istilah ) kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu : *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, datang dari Abdurrahman. Menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011), 7.



al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyyah*;
3. *Siyāsah Qadlaiyyah*;
4. *Siyāsah Harbiyyah*;
5. *Siyāsah Idāriyyah*.

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi *Fiqh Siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu:

1. *Siyāsah Qadlaiyyah*;
2. *Siyāsah Dauliyyah*;
3. *Siyāsah Māliyah*.

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Shar’iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadlaiyyah*;
2. *Siyāsah Idāriyyah*;
3. *Siyāsah Māliyyah*;
4. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah*.

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 13.



Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyāsah Mālīyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
4. *Siyāsah Qadlaiyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah Shar’iyyah* (kebijaksanaan luar negeri dan hubungan internasional).
7. *Siyāsah Tanfīdziyyah Shar’iyyah* (politik pelaksanaan Undang Undang).
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:<sup>9</sup>

1. *Siyasah Dusturiyyah* , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga

---

<sup>9</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* ( Surabaya: IAIN Press, 2011 ), 15-16.









Undang-Undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga *al-sultah al-tashri'iyah*, maksudnya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidiyyah*; kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al-qadhaiyyah*; kekuasaan yudikatif.

Tiga kekuasaan tersebut yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara imbang menegangkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam *Fiqh Siyasa* dapat dirumuskan sebagai berikut: a). pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam; b). masyarakat islam yang akan melaksanakan; c). isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat islam.

### 3. Ummah

Dalam konsep islam ummah diartikan dalam empat macam yaitu

a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan; b). penganut suatu agama atau pengikut nabi; c). khalayak







## Kekuasaan (*Sultah* ) dalam Negara Islam, Abdul Wahab

1. Lembaga legislatif (*Sultah Tashri'iyah* ), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

2. Lembaga eksekutif (*Sultah Tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.

3. Lembaga yudikatif (*Sultah* Qadā'iyah), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara islam itu dibagi menjadi lima bidang, artinya lima kekuasaan dalam Negara islam, yaitu:

1. *Sultah Tanfidhiyyah* (Kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).

2. *Sultah* Tashrī'iyah (Kekuasaan pembuat Undang-Undang).

3. *Sultah* Qadā'iyyah ( Kekuasaan kehakiman).

4. *Sultah* Māliyah (Kekuasaan keuangan).

[illegible]

5. *Sultah Muraqabah wa Taqwin* (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

#### D. Obyek Kajian *Siyāṣah Dustūriyyah*

*Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin serta hak-hak warga Negara wajib dilindungi.

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasanya obyek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.<sup>17</sup> sedangkan obyek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat

<sup>17</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 ), 27.



4. *Ba'iah 'Ammah* atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan; Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat islam.<sup>20</sup>

2. *Wizarah*

*Wizarah* merupakan aspek penting dalam struktur pemerintah islam yang membantu menyelesaikan tugas kepala Negara. Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu disebut *wazir*. Dalam perjalanan sejarah islam ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala Negara maka orang-orang yang bertugas membantu tugas kenegaraan itu adalah para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Praktek dan sistem semacam ini berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Dimasa ini para *wazir* mempunyai peran sebagai kepanjangan tangan khalifah. Oleh karenanya seorang wazir punya wewenang untuk mengkoordinir departemen (*diwan* ) seperti

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 130.



(rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.<sup>23</sup>

Keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat islam terutama Al-Quran dan Hadist serta sunnah dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi dalam hal ini Imamah atau Khalifah.

Dalam konteks saat ini keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dapat dikatakan sama dengan badan legislative karena dapat dilihat dari persamaan tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu sama-sama membuat peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* akan penulis paparkan di sub bab berikutnya.

#### E. Pengertian *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dapat diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”.

<sup>23</sup> Ibid, 5.



2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para *amir*, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian definisi menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Adapun praktek dari lembaga ini pernah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar dengan mengangkat enam orang sahabat



senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa nanti yang akan menggantikan sebagai khalifah setelah beliau wafat.

Pada saat itu memang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* belum terlembaga sendiri. Namun dalam prakteknya para sahabat tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijakan Negara dan pemerintahan. Dari perjalanan historis tersebut para ulama *siyasah* merumuskan tentang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Menurut mereka para khalifah telah melakukan empat cara pemilihan yang berbeda, dipilih oleh pemuka umat islam untuk menjadi kepala Negara dan selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia ( baiat ) oleh seluruh umat islam terhadap khalifah terpilih.<sup>28</sup>

#### F. Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* disamping itu punya hak pilih, menurut ridha juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.<sup>29</sup> Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu:<sup>30</sup>

1. Memilih dan membaiaat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 138.

<sup>29</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 ), 71.

<sup>30</sup> Djazuli, *Fikih Siyasah*, ( Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003 ), 76.



3. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas didalam Al-Quran dan Hadist.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan.
5. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

#### H. Syarat Laki-Laki dan Hak Politik Perempuan

Kita sering mendengar syarat “Laki-Laki” dalam kewenangan pada pembahasan-pembahasan para ulama fikih terdahulu dan sekarang, dengan beragam perbedaan seputar masalah itu. Sebagaimana syarat itu dalam kewenangan peradilan. Namun, mayoritas mensyaratkan “Laki-Laki” dalam kepemimpinan besar berdasarkan nash hadist yang berbunyi: *Tidak akan beruntung suatu kaum, jika mengurus perkara mereka itu perempuan.*<sup>33</sup>

Diantara dalil yang paling jelas bahwa Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak politik, yang diantaranya hak dalam memilih dan hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif:

1. Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>33</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), 122.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَثِيرٌ

عَلِيًّا

كَانَ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (QS. An-Nisa' (4): 34)

Dewan legislatif menempati tempat “pemimpin” diseluruh Negara, sebab dewan ini yang memegang kemudi.

Al-Maududi berkata: “Sesungguhnya Alquran tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah Negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah Negara.”<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2005 ), 123.

Dalil selanjutnya, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Maududi, firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu (wanita) tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu”. (QS. Al-Ahzab (33): 33).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadist shahih: *tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur urusan mereka adalah perempuan.*

Hadist ini sangat sering diucapkan oleh mereka berpendapat bahwa Islam tidak menyetujui persamaan perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik, ditambah dengan dalil-dalil lainnya.

Diantara ulama itu adalah Ibnu Hazim, Dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, jika ada yang berkata: “Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan.* Maka kami akan menjawab: “Beliau mengatakan itu

[illegible]



fikih hadist. Maka, disana ada beberapa indikasi yang membolehkan pengalihan makna dari makna lahirnya atau mengalihkan keumumannya menjadi khusus.

Mengangkat seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada *nash*-nya secara jelas, apalagi menyatakan larangan mengangkat perempuan menjadi pemimpin jika dia memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang berkompoten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بِالْعَدْلِ ۚ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: “ Ayat ini ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan.”



Perlu disinggung juga bahwa hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin yang tersebut dalam hadist diatas dan apa yang dipahami oleh para ulama bahwa hadist ini menyatakan larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin, masih dipertimbangkan. Sebab pijakan pengeluaran hukum itu menurut kamu bukan pada pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, melainkan rusaknya sistem hukum pada mereka ( penduduk Persia ) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya juga tidak menetapkan hukum antara manusia dengan adil, serta mnyerahkan perkara mereka kepada perempuan yang tidak layak menjadi pemimpin, mereka memilih anak perempuan kisra untuk menjadi pemimpin setelah kematian bapaknya. Inilah sebab tidak beruntungnya kaum yang disebutkan dalam hadist.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Ibid, 132.

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR BAKAL CALON  
LEGISLATIF PEMILU 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017**

Bangsa Indonesia adalah Negara hukum yang dimana segala aspek berwarga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, kecuali itu penyebutannya hanya ada pada bagian penjelasan umum tentang “*Sistem Pemerintahan Negara* “ yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat* ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( *Machtsstaat* ).

[illegible]



### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dengan begitu sudah tidak ada lagi ketimpangan gender antara untuk hak-hak kaum laki-laki dan kaum perempuan semua sama dimata hukum khusus terhadap hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti dalam hal politik, yaitu untuk mengisi bangku-bangku didalam lembaga legislatif, perempuan mempunyai hak untuk itu.

Kemendagri mempunyai rekomendasi dalam mewujudkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Pertama; diperlukannya dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan 30% keterwakilan perempuan dilegislatif. Kedua; keterwakilan perempuan dikepengurusan partai politik agar diberi pembekalan secara makro hingga detail. Pembekalan secara detail dilaksanakan melalui orientasi dan pendalaman tugas.<sup>3</sup>

Setelah empat kali pemilu dilaksanakan secara demokratis, perolehan kursi perempuan diparlemen tingkat nasional ( DPR RI ) masih belum

<sup>3</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/peningkatan-keterwakilan-perempuan-pada-lembaga-legislatif>, Diakses pada tanggal 16 mei 2018 pada pukul 18.17.





Perekrutan bakal calon legislative oleh Partai politik pasti tidak lepas dari persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi:

## Pasal 240

(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

[illegible]



- lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai jabatan Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya berumber dari keuangan Negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Hak-hak politik perempuan sampai saat ini masih merupakan masalah krusial, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi tersebut terwujud karena sebagian besar masyarakat didunia ini adalah masyarakat patriarki. Hak politik perempuan mengisyaratkan partisipasi individu dalam



pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil lembaga legislatif atau sebagai calon legislatif. Hak-hak politik tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.

Hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui oleh Undang-Undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga Negara. Hak politik paling mendasar bagi warga Negara adalah hak memilih ( menentukan pilihan ) dalam pemilu dan hak memilih dalam referendum, tidak terbatas apakah warga Negara tersebut kedudukannya sebagai rakyat biasa ataukah dalam kedudukannya sebagai pejabat atau petugas Negara.

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan dilegislatif sangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesetaraan gender, posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah Undang-Undang Pemilu dan

---

<sup>7</sup> Sulistyono Adi Winarto, *Peranan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, No. 12, Vol. 6, ( Jember, 2010 ), 120.

ranah internal partai politik, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang.

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak politik perempuan (*The Convention on Politics Rights of Women*) pada 12 desember 1958.

Dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, berarti pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjalankan setiap bagian dari pasal dua konvensi itu secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih relative rendah.

Banyak argumen yang menerangkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. *Center for Asia Pasific Women in Politics* mencatat adanya dua faktor utama, yaitu: 1.

Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; 2. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atau akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu).

Salah satu penelitian tentang keterwakilan perempuan diantaranya menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih adalah: 1. Sistem pemilu; 2. Peran dan organisasi partai-partai politik; 3. Penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung ( *Affirmative action* / aksi afirmatif atau diskrimasi positif ) yang bersifat wajib atau sukarela ).

Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti dibalik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “ tanda “ dalam kehidupan politik.<sup>8</sup> Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau presentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (

---

<sup>8</sup> Drude Dahlerup, “Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan”, dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sejalan Jumlah*, IDEA: 2002, 114.

calon anggota legislatif/ caleg ), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki dibidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratis. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratis adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar.

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan berbagai ikhtiar, terhadap hal ini muncul keinginan agar representasi perempuan dilembaga legislatif ditingkatkan.

Sebagai wujud warga bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Konvensi tentang hak-hak politik perempuan Tahun 1952 menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of*

---

<sup>9</sup> Nalom Kurniawan, "Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), 717-718.







direvisi pasal 245 yang diharuskan memenuhi 30% keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif.

Dalam pada itu khofifah Indar Parawansa mengemukakan, bahwa: sejarah tentang representasi perempuan diparlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan diwilayah republik. Kongres wanita pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat khofifah tersebut, terlihat bahwa jauh sebelum Indonesia memproklamirkan, kaum perempuan sudah lama melakukan perjuangan karena adanya kesadaran perempuan akan ketinggalanya dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aspek, juga adanya keinginan untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan dengan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan, termasuk dalam politik.

Ikhtiar untuk meningkatkan peran perempuan dilembaga legislatif pada akhirnya membuahkan hasil sejak dimasukkannya rumusan kuota 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan untuk duduk di kepengurusan partai

---

<sup>12</sup> Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.



politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimasukkannya rumusan kuota 30% tersebut oleh berbagai kalangan dinilai sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan di lembaga DPR, serta sejalan pula dengan norma rumusan Pasal 4 CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Namun tindakan afirmatif dalam rumusan UU pemilu legislatif dengan dimasukkannya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di DPR, menjadi bahan diskursus yang menarik sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengadopsi sistem suara terbanyak. Pada satu sisi, pertimbangan putusan MK tersebut menyatakan bahwa tindakan afirmatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (2) dipandang sebagai diskriminatif secara terbalik atau reverse discrimination, sehingga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, namun pada sisi yang berseberangan.

Pemberlakuan sistem suara terbanyak justru dianggap banyak pihak dapat meredusir upaya afirmatif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Meski pada akhirnya Putusan



**ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU 2019 (STUDI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)**

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politiknya kaum perempuan melalui sistem kuota yang dimulai di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekrutmen dan manajemen partai politik.

[illegible]

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan dilegislatif sangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesetaraan gender, posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah Undang-Undang Pemilu dan ranah internal partai politik, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang.

Partai politik harus memperhatikan hak itu karena pengajuan menjadi anggota legislatif berawal dari partai politik yang mengajukan perempuan yang berkompeten sebagai anggota legislatif agar tercapainya representasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30%, dan partai politik memperhatikan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 246: (1). Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut; (2). Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3(tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon; (3). Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pemerintah harus lebih cermat dalam memperhatikan keterwakilan perempuan yang didaftarkan oleh partai politik agar tercapainya representasi 30%, dan bertindak tegas jika partai politik tidak memasukan keterwakilan

Menurut penulis ada positifnya juga bila keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang lebih ditingkatkan agar sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah direvisi untuk representasi keterwakilan harus memenuhi kuota 30%, untuk khususnya partai politik harus lebih memperhatikan kembali, untuk mencantumkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 yang akan datang dapat tercapainya 30% kuota keterwakilan perempuan

## FIQH SIYASAH TENTANG KETER

ulama fikih menyebut untuk seseorang yang l  
untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Al  
dapat diartikan sebagai orang-orang yang memp  
gerakan dan mengikat, dengan kata lain adalah le

g definisi dari Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi, diantara v

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah Ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian definisi menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* disamping itu punya hak pilih, menurut ridha juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* yaitu:

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.





mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara' dan logika.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Naml ayat 32-35:

Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Ketika ratu telah membacakan surat Nabi Sulaiman as. kepada mereka, ia pun bermusyawarah dengan mereka tentang urusan tersebut dan

apa [kira-kira] yang akan terjadi. Untuk itu ia berkata, yaa ayyuHal mala-u aftuunii fii amrii maa kuntu qaathi’atan amran hattaa tasyHaduun (“Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku [ini], aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”). yaitu hingga kalian datang dan mengemukakan pendapat kalian.

Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: “ Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan. “ perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar kesejahteraan rakyatnya, menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka ( penduduk Persia ) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kisra yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Diantara ulama itu adalah Ibnu Hazim, Dia berkata: “Boleh saja perempuan memegang suatu hukum ( wewenang ), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, jika ada yang berkata: “ Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan

wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan”. Maka kami akan menjawab: “Beliau mengatakan dalam perkara kekhalifaan. Buktinya adalah sabda Rasulullah SAW: “Perempuan (istri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kewenangannya itu”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga legislatif, tetapi untuk menjadikan perempuan sebaga anggota legislatif harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara.



perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah.

Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.

## **B. Saran**

Penulis berharap agar pada pemilu legislatif 2019 yang akan datang representasi keterwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya pada periode 2014 lalu yang belum mencapai target yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tentang pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit harus memenuhi kuota sebanyak 30%, dan agar partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2004.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ariany, Lies, *Partispasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Diprovinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol II, Juni, 2009.
- Dahlerup, Drude, *“Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan”*, dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sejedat Jumlah*, IDEA: 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, *Fikih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: Amzah, 2002.
- Hardjaloka, Loura. *Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Nomor 2 Vol. 9, Jurnal Konstitusi, Juni, 2012.
- Hidayati, Alif. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPDP, dan DPRD, ( Skripsi-Universitas Islam Sunan Ampel, 2014.
- <http://kemendagri.go.id/news/2017/11/17/tjahjo-kumolo-keterwakilan-perempuan-dalam-politik-sangat-penting>, Dilansir pada 20 Maret 2018 pukul 19.30 WIB.



Naning, Ramdlon. *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982.

O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sidney Verba, *Women in American Politic*, bagian penutup dalam *Women, Politics and Change*, Louise A. Tilly dan Patricia Gurin, Russel Sage Foundation, New York, 1990.

Silvana, Nuni. *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif*, (Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, 2013).

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1991.

Soyomukti, Nurani. *Perempuan Dimata Soekarno*, Jogjakarta: Garasi, 2009.

Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.